

NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2020

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat



Oleh

Ristiaji Nugroho

KMP.19.00082

PEMINATAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
WIRA HUSADA YOGYAKARTA

2021



NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2020

Disusun Oleh :
Ristiaji Nugroho
KMP.19.00082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 13 Agustus 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I

Heni Febriani, S.Si., M.P.H

Pembimbing II

Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H

Naskah publikasi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Yogyakarta,.....

Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)



Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H



IMPLEMENTATION OF KAMPUNG KELUARGA PLANNING IN BANTUL REGENCY IN 2020

Ristiaji Nugroho¹, Heni Febriani², Dewi Wulandari²

ABSTRACT

Background: One of the priority programs in Nawacita is Family Population Development Be Planned (Bangga Kencana). Family Development through the Implementation of Kampung KB is expected to overcome population and welfare problems. Kampung KB program is a program designed as a collaborative program to bring development closer to the community and improve family welfare involving all sectors of development. The implementation of Kampung KB in Bantul Regency since 2016 has succeeded in launching 47 KB villages spread across 17 districts.

Method: This research is descriptive using a qualitative approach with research implementation research design. Qualitative data collection method with in-depth interviews to key informants. The number of informants from 47 heads of Kampung Keluarga Planning and 2 key informants from the manager of Kampung Keluarga Planning. Data collection with interviews and documentation. The data used is primary data and secondary data. Analysis of data with qualitative techniques with reduction, presentation and withdrawal of conclusions.

Results: from the implementation of KB village in Bantul Regency since 2016 obtained classification 1 Kampung KB with Paripurna classification, 4 kb villages with independent classification, 25 kb villages with growing classification and 17 kb village basic classification.

Conclusion: from the Implementation of KB village in Bantul Regency found problems related to the adequacy and quality of human resources, support, adequacy of infrastructure facilities, and participation from across sectorsal

Keywords: Implementation, Kampung KB, Success

¹Student of Public Health Study Program (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

² Lecturer of Public Health Studies Program (S1) STIKES Wira Husada
Yogyakarta

IMPLEMENTASI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Ristiaji Nugroho¹, Heni Febriani², Dewi Wulandari²

ABSTRAK

Latar belakang : Salah satu program prioritas dalam Nawacita adalah Pembangunan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Pembangunan Keluarga melalui Implementasi Kampung KB diharapkan bisa mengatasi permasalahan kependudukan dan kesejahteraan. Program Kampung KB merupakan program yang didesain sebagai program kolaboratif untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga melibatkan semua lintas sektor pembangunan. Implementasi Kampung KB di Kabupaten Bantul semenjak tahun 2016 telah berhasil mencanangkan 47 kampung KB yang tersebar di 17 Kecamatan.

Metode: Penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Penelitian implementasi riset. Metode pengumpulan data kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan kunci. Jumlah informan dari 47 ketua Kampung Keluarga Berencana dan 2 informan kunci dari pengelola Kampung Keluarga Berencana. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dengan tehnik kualitatif dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil : dari implementasi kampung KB di Kabupaten Bantul semenjak tahun 2016 didapatkan klasifikasi 1 Kampung KB dengan klasifikasi Paripurna, 4 kampung KB dengan klasifikasi mandiri, 25 kampung KB dengan klasifikasi berkembang dan 17 kampung KB klasifikasi dasar.

Kesimpulan : dari Implementasi kampung KB Di Kabupaten Bantul ditemukan permasalahan terkait kecukupan dan kualitas SDM, dukungan anggaran, Kecukupan sarana prasarana, serta peran serta dari lintas sektoral

Kata Kunci : Implementasi, Kampung KB, Keberhasilan

¹Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

²Dosen Progam Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk masih menjadi masalah besar di Indonesia, pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial. Pemerintah melalui BKKBN menggalakkan program KB melalui Implementasi Kampung KB. Kampung KB satuan wilayah setingkat Rw, dusun, atau setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program kependudukan, KB, pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui program BKB, BKR, BKL, Pusat Informasi Konseling Remaja dan UPPKS. Menurut Mulyadi (2015) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan dalam suatu keputusan.

Adapun sasaran kampung KB adalah keluarga, pasangan usia subur, masyarakat, balita, remaja dan lansia. Kampung Keluarga Berencana diharapkan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dan perwujudan dari sinergi antara lintas sektoral, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra kerja dan pemangku kepentingan. Menurut Mardikanto (2015) pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat miskin, marjinal untuk menyampaikan pendapat, dan atau kebutuhannya, pilihan pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung gugat demi perbaikan dirinya. Menurut Miller (2014) KB merupakan program yang memiliki kuantitatif paling sederhana dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program kampung KB merupakan salah satu program inovatif pemerintah yang strategis dalam memperkuat program kependudukan keluarga berencana. Hasil penelitiannya menunjukkan keberhasilan implementasi kampung KB dari sisi jumlah aseptor sedangkan permasalahan yang ditemukan seperti kurang antusias dan pemahaman dari masyarakat dan kurangnya SDM (Siti Nunung Nurjanah dan Euis Susanti). Peneliti Ariani (2018) juga menunjukan implementasi kampung KB belum berjalan dengan baik dari pelaksanaan program yang tidak berjalan serta kekurangan dari indikator SDM, hubungan antara organisasi dan disposisi implementor. Menurut BKKBN (2016) Indikator keberhasilan input yang belum tercapai anggaran kegiatan yang berjalan di kampung KB, operasional berasal dari APBD dan potensi lokal/ CSR dll

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kampung KB di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan implementasi riset. Penelitian ini dilaksanakan bulan Februari 2021-Juli 2021 di Kampung KB yang ada di Kabupaten Bantul. Data kualitatif didapatkan dengan wawancara mendalam pada 47 ketua kampung KB. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam melibatkan informan kunci pada Kepala Seksi Kelembagaan dan Kepala Dinas PPKBPMDD. data dianalisis menggunakan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian Implementasi Kampung KB di Kabupaten Bantul tahun 2020 didapatkan permasalahan, terkait

1. Input

- a. *Man/ SDM*, permasalahan yang di temukan terkait dengan kecukupan dan kualitas SDM yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan, berikut penjelasan informan (Pengelola Kampung KB)

“..SDM pendukung terbatas, semangat warga maupun pengurus naik turun (Informan 5)

“..kendala SDM belum profesional, minat generasi muda belum optimal..” (Informan 7)

“..SDM merangkap sebagai kader lainnya dan motivasi warga kurang..” (Informan 8)

“..pengurus banyak yang gaptek..”(Infoman 19)

“.. SDM banyak usia lanjut..”(Informan 21)

“..motivasi pengurus naik turun..” (Informan 43)

Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan kunci ,

“..memang diakui semenjak dicanangkan kampung KB di Kabupaten Bantul salah satu permasalahan yang ditemui adalah terkait pengurus Kampung KB yang terbatas, minat warga Kampung KB menjadi pengurus rendah..” (IK 2)

Didalam suatu kampung KB idealnya terdiri dari pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, ketua kelompok kerja dan ketua kelompok kegiatan serta anggota dan kader. Keberhasilan dari suatu kampung KB tidak hanya berdasarkan jumlah namun juga kualitas dari pengurus. Kemampuan dalam berorganisasi, menajerial, paham tehnologi komunikasi menjadi dalam suatu implementasi kegiatan agar berhasil mencapai tujuan dengan baik. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya Junaidi Indrawadi (2019) bahwa implementasi kampung KB di Kalurahan Pangilun Kecamatan Padang Utara kota Padang, menemui beberapa kendala antara lain belum dibentuknya pengelola aktif yang menjalankan program, dan keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran

- b. *Money/ Anggaran*, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini di hampir semua Kampung KB yang ada di Kabupaten Bantul mengeluhkan dukungan anggaran dana desa untuk program kegiatan Kampung KB yang dituangkan dalam peta kerja. berikut penjelasan informan (Pengelola Kampung KB)

“..sinkronisasi dana desa dengan program kerja Kampung KB yang belum bisa maksimal..”(Informan 3)

“.. kendala belum sinkron peta kerja dengan dana desa, masih tergantung pembiayaan dari dinas..” (Informan 39)

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan informan kunci

“ Perkembangan Kampung KB di Kabupaten Bantul, memang belum sesuai harapan, hal ini dikarenakan belum ada regulasi baik dari pusat maupun daerah tentang Kampung KB hal ini menyebabkan anggaran baik didinas maupun desa untuk kampung KB belum bisa Teranggarkan dengan maksimal...”(IK 2)

Keberhasilan suatu implementasi kampung KB dipengaruhi dari faktor input yang baik. Kecukupan dan kualitas SDM, ketersediaan sarana prasarana pendukung, serta kecukupan dukungan anggaran. Indikator keberhasilan input tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun bisa juga dari dukungan (CSR) *Corporate Social Responsibility dll* (BKKBN, 2016).

Faktor pendukung keberhasilan suatu program kegiatan adalah dukungan anggaran. Anggaran kampung KB berasal dari APBN, APBD, swadana maupun CSR. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya Novy Setia Yunas dan Faza Dhora Nailufar (2019) yang menyatakan keberhasilan Kampung KB di Jombang dipengaruhi ketersediaan dukungan operasional (anggaran).

c. *Material*, ketersediaan sarana prasana penunjang seperti komputer, printer, modem yang ada di Kampung KB, ketersediaan Rumah Data Kependudukan, pengelolaan data, hal ini seperti disebutkan oleh informan (pengelola kampung KB)

“..administrasi fisik seperti data kependudukan belum lengkap..”(Informan 4)

“.. sarana prasarana masih minim, lepton dan modem belum ada..” (Informan 8)

“.. rumah data di kampung kb belum baik adanya data belum update..” (Informan 20)

“..sarana prasarana terbatas, rumah data belum diolah dan dianalisis..(Informan 35)

Berikut penjelasan informan kunci.....

“ ..Selama pencaanangan Kampung KB di Kabupaten Bantul sejak tahun 2016 dengan segala pencapaiannya dan prestasinya, memang masih menemui beberapa kendala, belum semua kampung KB mendapatkan dukungan sarana prasarana dari desa diwilayahnya. Terkait kegiatan dan perkembangan Kampung KB dan pelaporan secara Online. Dukungan/ partisipasi dikampung KB masih terbatas pada kegiatan tertentu..” (Informan Kunci 2)

Keberhasilan implementasi kampung KB juga dipengaruhi ketersediaan sarana prasana Rumah Data Kependudukan sebagai pusat kegiatan dan mendisplay hasil olah data dan kegiatan sangat penting adanya. Ketersediaan komputer, printer dan modem mendukung kelancaran pengolahan data, menampilkan data, dan melakukan pelaporan online kegiatan kampung KB. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Darmawan Sumba (2021) yang menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan kampung KB di Kota Barat dipengaruhi faktor ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan SDM.

2. Terkait Proses di kampung KB ditemukan permasalahan pada Intervensi lintas sektoral. Hal ini seperti disebutkan oleh informan (pengelola kampung KB)

“..perhatian dari kalurahan juga kami butuhkan, karena selama ini kami belum di karuhke oleh kalurahan..” (Informan 6)

“.. terkait kendala selama ini mengelola kampung KB adalah partisipasi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, Informasi dan pelatihan untuk kampung KB dirasa masih sangat kurang (Informan 9)

“..pelatihan pengembangan produk lokal masih kurang, kurangnya dukungan dari pemerintah kalurahan..”(informan 10)

“..atensi dari pengurus maupun lintas sektoral masih rendah, ketika diundang belum tentu hadir..(informan 22) “..dukungan dari lintas sektoral belum begitu dirasakan..” (informan 38)

“.. suport dari lintas sektoral kurang. “ dukungan dari lintas sektoral belum begitu dirasakan” (informan 44)

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan informan kunci

“..Belum semua OPD di Kabupaten Bantul memahami tujuan, manfaat dan lokasi keberadaan Kampung KB sehingga keterlibatan dalam penggarapan, pengalokasian kegiatan belum menyentuh Kampung KB..” (Informan Kunci 1)

Dari segi proses juga mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kampung KB. Peran serta lintas sektoral sebagai salah satu kunci keberhasilan. Keterlibatan lintas sektoral dalam penggarapan kampung KB sebagai salah satu bukti komitmen peran lintas sektoral terhadap kampung KB.

Hal ini sebagai pengembangan konsep *Collaborative Governance*, pengembangan konsep yang bertujuan pada ketercapaian tujuan serta efektifitas pembangunan. Sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung agar teribat dengan pemangku kepentingan non publik dalam mengimplementasikan kebijakan publik Ansell dan Gash (2007) hal ini juga sama dengan penelitian terdahulu Bintang (2017) keberhasilan kampung KB mencakup kegiatan yang melibatkan kegiatan yang mencakup beberapa sektor dan membutuhkan

adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Naufal (2010) faktor penghambat pelaksanaan program belum adanya binaan khusus dari instansi dan keterlibatan lintas sektoral.

KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian, gambaran input dari Implementasi Kampung KB di Kabupaten Bantul banyak menemui kendala, terjadi pada komponen *man* yang mana dirasa SDM pengurus Kampung KB dirasa kurang jumlahnya dan kualitasnya. Terkait anggaran juga terbatas karena kegiatan program Kampung KB bisa sinkron dengan anggaran desa melalui usulan bertahap pada Musrenbangdes, Musrenbangdes dan Musrenbang tingkat kecamatan sehingga belum terdani. Tidak semua kampung KB bisa swadana jadi hanya mengandalkan anggaran dari Dinas PPKBPMD dan Anggaran BOKB untuk akomodasi pertemuan pertemuan. Terkait sarana prasana ditemukan ada beberapa kampung KB yang belum memiliki rumah data kependudukan yang layak, ketersediaan komputer, modem, dan printer untuk mengolah dan mendisplay hasil olah data.
2. Dari hasil penelitian, gambaran proses dari Implementasi Kampung KB di Kabupaten Bantul sebagian besar masih menemui kendala pada mekanisme operasional khususnya komponen Intervensi lintas sektoral di kampung KB. Hal ini berpengaruh pada pengembangan suatu potensi dari wilayah kampung KB membutuhkan bimbingan dan arahan dari pihak yang berkompeten

SARAN

Kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait alokasi dana desa dan lebih banyak mensosialisasikan keterlibatan lintas sektoral baik dari Organisasi Pemerintah Daerah maupun sektor swasta terkait untuk pengembangan kampung KB. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek dan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan kepada kampung KB.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah memberi ijin dan fasilitasi untuk penelitian ini, serta pihak yang membantu kelancaran dan kemudahan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mulyadi. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat
2. Mardikanto, T., Soebianto, P. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabetha
3. Miller. 2014. Nursing for Wellnes in Older Adult Sixth Edition, The Point, Ohio
4. Siti Nunung Nurjanah dan Euis Susanti. 2018. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Kuningan
5. Ariani. 2018. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
6. BKKBN. 2015. Petunjuk Tehnis Kampung Keluarga Berencana, Jakarta,
7. Riski Hoeriah. 2019. Implementasi Program Kampung KB di Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten
8. Novy Setia Yunas dan Faza Dhora Nailufar. 2019. Collaborative Governance melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang
9. Junaidi Indrawadi. 2019. Implementasi Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kalurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
10. Novy Setia Yunas dan Faza Dhora Nailufar. (2019). Kebijakan Kampung KB di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur
11. Prasetyo Darmawan Sumba. (2021). Implementasi Kebijakan Kampung KB di Kota Barat
12. Chris Anshell dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice